

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia harus hidup bermasyarakat, sebab ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat,. dalam hidup bermasyarakat yang penting adalah sesama manusia melakukan kerja sama yang positif sehingga kerja sama itu secara konkrit dapat membawa keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut. Kerja sama secara positif adalah dalam upaya mengejar kehidupan yang layak sebagai manusia. Masing-masing mereka tidak boleh mengganggu, tetapi harus saling membantu. Sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa bantuan orang lain atau harus ada kontak di antara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan melakukan hubungan Perjanjian atau biasa dikatakan dengan bentuk Perikatan.¹

Manusia adalah makhluk yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan bekerja keras. Manusia juga adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, dan untuk karena itulah manusia harus mendapatkan pekerjaan ataupun membuat pekerjaan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya

¹ Chandra Suwondo, Outsourcing; Implementasi di Indonesia, Elex Media Computindo, Jakarta, hal 2

tersebut. Proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia menciptakan sekelompok orang atau orang perseorangan yang membuat suatu bentuk pekerjaan yang beragam hingga saat ini. Dan untuk pemenuhan produktifitas pekerjaan tersebut, tentunya mereka juga membutuhkan *skill* yang beragam pula, oleh karena itu, banyak juga lapangan pekerjaan yang tercipta untuk para pencari kerja di luar sana. Saat ini sudah banyak dan beragam sekali jenis pekerjaan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia sendiri, mulai dari supir angkutan umum, nelayan, pejabat, polisi dan untuk lingkup pekerjaannya juga sudah bervariasi, mulai dari bekerja di sekolah, kantor, bank, hingga koperasi.

Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan. Guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak yang terikat dalam perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.² Dengan dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian maka apa yang diharapkan sebagai maksud dan tujuan diadakannya perjanjian akan tercipta dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan yang dapat menuntut atas kerugian yang dideritanya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti:³

"Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan."

² Imam Soepomo, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, hal.13.

³ R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian Cetakan kedua belas*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 9 (Selanjutnya disebut dengan R. Subekti 1).

Demikian juga dalam bidang pekerjaan, orang melakukan perjanjian kerja sehingga menimbulkan perikatan. Setiap hubungan kerja yang tercipta, baik formal maupun informal, pada dasarnya selalu didahului dengan adanya perjanjian kerja. Untuk pekerjaan informal, perjanjian kerja antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan biasanya dilakukan secara lisan sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang formal, seperti di pabrik atau perusahaan, perjanjian kerja pada umumnya dibuat secara tertulis. Pada dasarnya baik tertulis maupun tidak, perjanjian kerja tersebut sama-sama mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak.

”Demikian pula dalam perjanjian kerja, seorang buruh mengadakan perjanjian kerja dengan perusahaan atau majikan dengan mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu dengan maksud untuk memperoleh haknya itu harus memberikan sesuatu kepada majikannya berupa pengarahannya jasanya sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan.”⁴

Namun di dalam perjanjian kerja, kedudukan para pihak sering tidak seimbang. Kedudukan yang tidak seimbang ternyata membawa konsekuensi. Pada perjanjian untuk waktu tertentu, kedudukan majikan dan karyawan tidak pernah seimbang. Ada kalanya majikan lebih kuat daripada karyawan sehingga karyawan berada dalam kategori golongan lemah. Sebaliknya apabila karyawan mempunyai dedikasi dan

⁴ G. Kartas Poetra,dkk., 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, hlm. 73

profesionalisme dalam bidangnya maka akan lebih kuat dibanding majikan dalam hal pengupahan.

Tersedianya lapangan kerja baru untuk mengatasi meningkatnya permintaan kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai oleh pemerintah untuk mengatasi melonjaknya angka pengangguran dalam pembangunan ekonomi baik di Pusat maupun di Daerah.⁵ Untuk mewujudkan penawaran kerja tersebut pemerintah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di segala sektor, khususnya investasi langsung (direct investment) terutama pada sektor-sektor yang bersifat padat karya dan jangka pendek, seperti konstruksi, infrastruktur maupun industri pengolahan. Sementara pada sektor jasa, misalnya melalui perdagangan maupun pariwisata.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembagian sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual.

Hukum seyogianya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Jadi, sudah semestinya bila hukum yang mengatur

⁵ R. Goenawan Oetomo, 2004, Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia (Jakarta: Grhadika Binangkit Press, Hal. 15

mengenai perjanjian kerja memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Untuk memperoleh suatu kepastian hukum atau berupa penegasan mengenai hak dan kewajiban karyawan/tenaga kerja maupun pengusaha/majikan dalam hubungan kerja, pada umumnya para pihak membuat suatu perjanjian kerja.

Hubungan kerja antara buruh dan majikan diatur dalam Buku III Bab 7 a KUHPerdara, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya masih kurang. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2003), maka terciptalah salah satu solusi dalam dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. UU Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban, baik para tenaga kerja maupun para pengusaha dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi.⁶ Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi.⁷ Hal ini merupakan esensi dari disusunnya UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu mewujudkan kesejaterahan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha Indonesia.

Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam dan

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁷ FX.Djumialdji, 2006, Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 54

membahas permasalahan ini dalam satu tulisan karya ilmiah dengan judul ” **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA KARYAWAN KONTRAK DENGAN PT TYFOUNTEX INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**”.

B. Perumusan Masalah

Setiap penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah agar penelitian itu terlihat jelas dan dapat terfokus pada permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul, dan waktu. Pembatasan masalah juga dilakukan guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penelitian dan pembahasan masalah. Pembatasan masalah ini, penulis hanya akan melakukan penelitian dan pembahasan masalah sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak Dengan PT. Tyfountex Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan”

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan PT. Tyfountex Indonesia ?
2. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan perjanjian kerja yang

diberlakukan PT. Tyfountex Indonesia . bila dibandingkan dengan ketentuan perjanjian kerja yang terdapat dalam KUHPerdata dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Tujuan objektif mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan PT. Tyfountex Indonesia serta ketentuan-ketentuan perjanjian kerja yang diberlakukan PT. Tyfountex Indonesia . bila dibandingkan dengan ketentuan perjanjian kerja yang terdapat dalam KUHPerdata dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Tujuan subjektif, menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, untuk mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga untuk memperoleh data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai

gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis, mengembangkan pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya dalam hal ketenagakerjaan, memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum Perdata dan hukum Ketenagakerjaan.
- b. Manfaat praktis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh. Di samping itu, memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama perkuliahan.

D. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyebutkan bahwa:⁸ *“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut*

⁸ Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 hasil amandemen

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan hal di atas, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat sebagai pencerminan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk masalah mengenai penjualan hewan yang dilindungi oleh negara yang dilakukan melalui media internet. Pasal 1 ayat (3) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara

yang tidak bertentangan dengan hukum. Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila.

Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalamannya substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.⁹ Ketentuan selanjutnya yaitu terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional.¹⁰

Kata “Perjanjian” merupakan kata yang bentuk dasarnya “janji”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi perjanjian

⁹ Otje Salman Soemadinigrat dan Anton F.S, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, hlm 156

¹⁰ Penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasca Amandemen

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:¹¹

”Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”

Secara yuridis, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi : *“Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya.”*

Menanggapi definisi yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, para sarjana memberikan definisi mengenai perjanjian dari sudut pandangnya masing-masing.

UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian *“Pekerja/buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”*.¹² Pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.

Kepentingan santunan jaminan kecelakaan kerja, dalam

¹¹ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 215

¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek, pengertian "pekerja" diperluas maksudnya menjadi:¹³

- a) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
- b) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
- c) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Dalam penulisan skripsi ini pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., yaitu pekerja tetap, pekerja dalam masa percobaan, *trainee*, pekerja kontrak, dan pekerja honorer. Atau dengan kata lain selain Komisaris dan Direksi Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pekerja kontrak adalah tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan pekerjaan tertentu dengan menerima upah berdasarkan perjanjian kerja.

a. Perjanjian kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara pekerja dengan perusahaan yang mengatur mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam KUHPerdara tidak ada istilah perjanjian kerja, akan tetapi menurut pengertian Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian

¹³ Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Perburuhan, perjanjian perburuhan itu dilakukan antara majikan dengan serikat buruh, sedangkan perjanjian kerja dilakukan antara buruh secara perseorangan dengan majikan/perusahaan.

b. Perusahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

"Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah sesuatu, atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya.¹⁴ "

Perusahaan juga diartikan sebagai organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Sedangkan pengertian perusahaan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 adalah:¹⁵

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

¹⁴ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 255

¹⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”¹⁶ Dimana dalam hal ini penulis memberikan gambaran serta uraian secara terperinci tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan PT. Tyfountex Indonesia seperti misalnya apakah proses pembuatan Perjanjian Kerja terhadap karyawan kontrak telah sesuai dengan aturan undang-undang Ketenagakerjaan atau belum . Selain itu didalam penelitian ini juga dijelaskan tentang bagaimanakah ketentuan-ketentuan perjanjian kerja yang diberlakukan PT. Tyfountek Tbk. bila dibandingkan dengan ketentuan perjanjian kerja yang terdapat dalam KUHPerdara dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menunjukan bahwa pelaksanaan penelitian tidak menggunakan angka tetapi berupa kata- kata, gambar serta informasi

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia hal.58

yang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami yang menuntut keterlibatan peneliti secara langsung dilapangan terhadap peran kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap satwa yang di lindungi dengan melakukan penegakan hukum yang kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum peneliti secara langsung dilapangan yang kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum Perdata dan yang terdapat di dalam KUHPER, serta disandingkan dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Data yang Digunakan

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari beberapa sumber bahan hukum, seperti:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perUndang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi tersangka pada proses penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yakni:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 3) HIR
 - 4) Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literature - literatur tentang penanggulangan kejahatan terhadap satwa yang di lindungi.
- c. Bahan hukum tersier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti: kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan aturan Ketenagakerjaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perUndang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian dilakukan analisa data.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti

dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁷ Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Dinas Ketenagakerjaan dan PT Tyfountex Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut :¹⁸ Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum dimana dalam hal ini penulis ingin menguraikan tentang suatu kondisi atau posisi dari masalah karyawan kontrak yang ditinjau dari Undang-undang Ketenagakerjaan.

G. Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

¹⁷ Rika Saraswati, 2009, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta : Citra aditya, hal 19

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), hal 5

Bab Pendahuluan berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

Bab Tinjauan Pustaka berisikan mengenai tinjauan umum, yakni : Tinjauan umum tentang Perjanjian Kerja, Unsur–unsur Perjanjian Kerja, Syarat Sahnya Perjanjian Kerja, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja, Tinjauan Umum Perjanjian Kerja, Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja, Pengertian Hubungan Kerja, Unsur–unsur Hubungan Kerja, Tinjauan tentang Outsorcing, Pengertian Outsorcing, Pekerja Outsorcing dan Pengaturan Outsorcing.

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan mendeskripsikan tentang Pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan PT. Tyfountex Indonesia , Ketentuan-ketentuan perjanjian kerja yang diberlakukan PT. Tyfountex Indonesia . bila dibandingkan dengan ketentuan perjanjian kerja yang terdapat dalam KUHPerduta dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil penelitian